

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Pangandaran
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.9
Edisi	: Sabtu, 14 Oktober 2017

Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak



AGUS SUPRIYATMAN

SEJUMLAH kendaraan dinas yang belum membayar pajak terparkir di halaman Pemkab Pangandaran belum lama ini.

PANGANDARAN - Sebanyak 67 kendaraan dinas milik Pemkab Pangandaran tidak melakukan pembayaran pajak serta tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Berdasarkan data dari Samsat Pangandaran, kendaraan baik roda dua maupun empat itu belum membayar pajak sejak 2014. Salah seorang pegawai fungsional umum pengurus barang aset daerah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, Asep Rusli membenarkan adanya beberapa kendaraan dinas milik Pemkab Pangandaran yang tidak membayar pajak. Menurut Rusli, keberadaan kendaraan dinas yang tidak melakukan pembayaran pajak tersebut saat ini ada di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Kami selaku pengurus barang aset daerah hanya memberikan surat pembertahuan kepada para SKPD dan kantor kecamatan, mengingat keberadaan kendaraan dinas tersebut ada disana. Kita meminta kendaraan tersebut segera untuk dilunasi atau dibayar tunggakan pajaknya," saran asep, Jumat (13/10). Ia menjelaskan, awalnya hanya menerima surat dari Samsat yang menyebutkan adanya kendaraan milik aset Pemkab Pangandaran yang tidak melakukan pembayaran pajak. "Sebanyak 46 kendaraan dinas dari berbagai jenis terbagi dari kendaraan roda 4 sebanyak 19 unit, roda 2 dan roda 3 sebanyak 27 unit," katanya. Asep menegaskan, setiap kendaraan baik mobil maupun motor diwajibkan untuk membayar pajak setiap tahunnya. Namun ia prihatin ketika diketahui sebanyak 67 kendaraan dinas milik Pemkab Pangandaran tidak taat akan wajib pajak. "Yang membuat kita tercengang ada beberapa kendaraan dinas yang tidak melakukan daftar ulang sejak 13 Desember 2014," ungkapnya. Persoalan ini tentunya sangat prihatin dan menjadi perhatian masyarakat Pangandaran. Seperti yang dikatakan Diman (45) warga Pangandaran. Ia menyatakan, pemerintah sebaiknya lebih mengerti dan taat akan wajib pajak. "Tapi nyatanya malah melanggar. Bagaimana masyarakat bisa sadar membayar pajak jika pemerintahnya malah melanggar. Sebaiknya pemerintah menjadi contoh bagi masyarakat," kritiknya. (gus)**